

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat ini, perubahan iklim telah menjadi perbincangan yang sangat umum di kalangan masyarakat. Semakin banyaknya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh adanya anomali cuaca seperti badai dan angin ribut serta bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, tsunami, dan masih banyak lagi juga meningkatkan keresahan masyarakat. Belum lagi rusaknya ekosistem laut seperti hancurnya terumbu karang hingga beberapa fauna laut yang perlahan-lahan punah. Menurut beberapa ahli, kejadian-kejadian tersebut disebabkan oleh adanya pemanasan global (Triana, 2008).

Menurut Pinontoan, *et al* (2022), pemanasan global adalah peningkatan temperatur rata-rata udara di dekat permukaan bumi dan juga di lautan. Pemanasan global dapat disebabkan oleh berbagai hal. Salah satu penyebab pemanasan global yaitu aktivitas-aktivitas manusia seperti adanya pembakaran hutan besar-besaran, kegiatan perindustrian, dan pembakaran bahan bakar fosil berupa gas alam, batu bara serta minyak bumi. Dan tindakan-tindakan tersebut menyebabkan timbulnya emisi karbon. Emisi karbon atau emisi gas rumah kaca menurut Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 merupakan lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Dikutip dari dataindonesia.id berdasarkan data dari PLN Indonesia, pada tahun 2021 Indonesia menghasilkan emisi gas rumah kaca sebanyak 259,1 juta ton CO₂ dan

diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2030 beriringan dengan bertambahnya konsumsi BBM, gas, serta batu bara. Secara rinci, emisi karbon terbesar dihasilkan dari batu bara yaitu sebesar 222,2 juta ton CO₂ pada tahun 2021, sedangkan yang berasal dari gas sebesar 27,9 juta ton CO₂ dan yang berasal dari BBM sebesar 9 juta ton CO₂.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus bekerja keras dalam mengurangi produksi emisi karbon yang akan mengakibatkan efek gas rumah kaca yang merusak lapisan ozon bumi serta lingkungan (Website Resmi Pemerintah Indonesia, 2022). Pemerintah telah menyusun strategi yang diharapkan dapat mengurangi emisi karbon dan hal ini didukung oleh sebagian perusahaan-perusahaan penghasil emisi karbon di Indonesia dengan cara mengungkapkan emisi karbonnya pada laporan tahunan perusahaan sebagai tanggung jawab atas kegiatan bisnisnya yang berdampak kepada lingkungan. Tetapi, tidak semua perusahaan penghasil emisi karbon mengungkapkan emisi karbonnya, hal ini dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pengungkapan emisi karbon pada perusahaan penghasil emisi karbon di Indonesia. Atau dapat dikatakan bahwa pengungkapan emisi karbon pada perusahaan-perusahaan Indonesia masih bersifat sukarela atau disebut juga dengan *voluntary disclosure*. Pengungkapan emisi karbon juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Perusahaan juga seharusnya tidak hanya berfokus pada laba saja, tetapi juga perlu memperhatikan *stakeholder*-nya. Dengan penerapan tata kelola perusahaan atau *corporate governance* yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pengungkapan emisi karbon pada laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan perusahaan.

Komite Cadbury pertama kali memperkenalkan istilah *corporate governance* pada tahun 1992 dalam laporannya yang berjudul *Cadbury Report*. Dalam *Cadbury Report*, *corporate governance* didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tanggung jawab tata kelola perusahaan dipegang oleh dewan direksi. Mereka bertugas untuk menetapkan tujuan strategis perusahaan, mengawasi penyelenggaraan bisnis perusahaan dan kemudian melaporkannya kepada para pemegang saham berkaitan dengan pengawasan yang mereka lakukan. Menurut Oman *et al.* (2004), *corporate governance* mengatur hubungan antara pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal perusahaan. Dengan diterapkannya *good corporate governance*, perusahaan dinilai telah berusaha mengutarakan segala informasi termasuk emisi karbon perusahaan kepada *stakeholder* sesuai dengan prinsip *good corporate governance*. Dalam penelitian ini penerapan *corporate governance* dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip *corporate governance*, yaitu (1) Transparansi/*Transparency* (2) Akuntabilitas/*Accountability* (3) Responsibilitas/*Responsibility* (4) Kemandirian/*Independency* (5) Kewajaran dan Kesetaraan/*Fairness* (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Prinsip *corporate governance* pertama yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon dalam penelitian ini adalah transparansi. Menurut KNKG (2006), transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan informasi terkait aktivitas bisnis perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan diharapkan tidak hanya mengungkapkan persoalan yang ditetapkan oleh undang-undang, tetapi juga mengungkapkan hal-hal yang penting baik bagi pemegang saham, kreditur, maupun pemangku kepentingan

lainnya. Dengan kata lain, transparansi berarti perusahaan tidak hanya melakukan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) tetapi juga pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) termasuk pengungkapan emisi karbon. Maka, semakin tinggi transparansi sebuah perusahaan maka semakin besar kemungkinan emisi karbon diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Prinsip *corporate governance* yang kedua yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon dalam penelitian ini adalah akuntabilitas. Akuntabilitas menurut KNKG (2006) merupakan pertanggungjawaban perusahaan atas kinerjanya. Pengelolaan perusahaan harus dilakukan dengan benar sehingga berjalan sesuai dengan kepentingan perusahaan tanpa mengesampingkan kepentingan para *stakeholder*-nya. Pertanggungjawaban kinerja perusahaan dapat diwujudkan atau dituangkan dalam bentuk laporan-laporan perusahaan seperti laporan tahunan, laporan keberlanjutan dan laporan keuangan. Maka dari itu semakin akuntabel perusahaan, kemungkinan pengungkapan emisi karbon juga semakin meningkat.

Prinsip *corporate governance* yang ketiga yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban. *Responsibility* didefinisikan sebagai ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan (KNKG, 2006). Meskipun belum ada undang-undang yang mengatur tentang pengungkapan emisi karbon bagi perusahaan, tetapi pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu bentuk atau cara suatu perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat atas dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan.

Dengan begitu, diharapkan adanya pengungkapan emisi karbon akan meningkat seiring meningkatnya rasa tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat.

Prinsip corporate governance yang keempat yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon dalam penelitian ini yaitu kemandirian. KNKG (2006) menyatakan bahwa independensi berarti perusahaan dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnisnya tidak dipengaruhi oleh kepentingan dan campur tangan dari pihak manapun. Selain itu, perusahaan yang dikelola secara independen tidak terpengaruh oleh tekanan tertentu yang mengakibatkan perusahaan melenceng dari peraturan, tanggung jawab, kode etik, visi dan misi yang ada. Kemandirian ini dapat menciptakan lingkungan di mana perusahaan memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengungkapkan emisi karbonnya dalam laporan tahunan ataupun laporan keberlanjutan sebuah perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Prinsip *corporate governance* yang kelima yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon dalam penelitian ini yaitu kewajaran dan kesetaraan atau *fairness*. KNKG (2006) menyatakan bahwa *fairness* berarti perusahaan perlu memperlakukan para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya secara adil serta memenuhi hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengetahui informasi-informasi terkait perusahaan juga termasuk salah satu hak para pemangku kepentingan, maka dengan adanya prinsip ini diharapkan kemungkinan pengungkapan emisi karbon dalam suatu perusahaan dapat lebih meningkat.

Terdapat dua teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu teori *stakeholder*. Teori ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan aktivitas bisnisnya,

perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri tetapi juga kepentingan *stakeholder*-nya (Chariri & Ghozali, 2007). Perusahaan juga harus memenuhi harapan serta tekanan dari para *stakeholder* baik internal maupun eksternal, khususnya terkait sosial dan lingkungan yang akhir-akhir ini sedang marak diperbincangkan. Adanya *corporate governance* yang baik diharapkan semakin meningkatkan kemungkinan diungkapkannya emisi karbon sehingga perusahaan dapat memenuhi harapan serta tekanan dari para *stakeholder* terkait dengan masalah sosial dan lingkungan.

Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori legitimasi. Teori ini berpendapat bahwa perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi dari masyarakat (Amaliyah & Solikhah, 2019). Kehadiran perusahaan ditengah-tengah lingkungan masyarakat, menimbulkan tuntutan dari masyarakat terkait dampak lingkungan dari kegiatan bisnis perusahaan. Diterapkannya prinsip-prinsip *corporate governance* dalam suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pengungkapan emisi karbon. Sehingga hal ini dapat membantu perusahaan untuk mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa perusahaan telah menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungannya.

Penelitian terdahulu tentang pengungkapan emisi karbon pernah dilakukan oleh Okudo & Amahulu (2021) yang meneliti hubungan antara praktik pengungkapan karbon dan *corporate governance*. Pada penelitian ini, *corporate governance* diukur dengan *ownership structure*, *gender diversity* dan komite lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ownership structure*, *gender diversity* dan komite lingkungan berpengaruh positif terhadap praktik pengungkapan karbon. Penelitian sejenis juga

dilakukan oleh Elsayih *et al.* (2021) yang meneliti hubungan antara kinerja emisi karbon dan *corporate governance*. Namun dalam penelitian ini, *corporate governance* diukur dengan frekuensi rapat dewan, independensi dewan, diversifikasi gender dalam dewan, komite lingkungan, dan konsentrasi kepemilikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa independensi dewan, diversifikasi gender dalam dewan, dan komite lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja emisi karbon, sedangkan konsentrasi kepemilikan dan frekuensi rapat dewan berpengaruh negatif terhadap kinerja emisi karbon. Penelitian hubungan antara pengungkapan emisi gas rumah kaca dan *corporate governance* yang dilakukan oleh Grediani *et al.* (2020) dengan pengukuran *corporate governance* menggunakan proporsi anggota dewan komisaris independen, proporsi anggota dewan komisaris perempuan, ukuran dewan, jumlah anggota komite audit, dan jumlah anggota komite audit menunjukkan hasil bahwa proporsi anggota dewan komisaris perempuan, ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca. Sedangkan proporsi anggota dewan komisaris dan frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca. Sari & Susanto (2021) juga meneliti tentang hubungan pengungkapan emisi karbon namun dengan variabel independen yang sedikit berbeda yaitu tidak hanya *corporate governance*, tetapi juga ada *green strategy* dan *corporate social responsibility disclosure*. *Corporate governance* diukur dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, independensi dewan komisaris, dan komite audit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *green strategy* dan *corporate social responsibility disclosure*

berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon sedangkan *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Belum banyaknya perusahaan yang mengungkapkan emisi karbonnya dan masih jarang ditemukan penelitian hubungan antara *corporate governance* dan pengungkapan emisi karbon dengan pengukuran *corporate governance* yang menggunakan prinsip-prinsip *corporate governance* memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2020-2022. Alasan peneliti memilih perusahaan sektor energi sebagai objek penelitian ini yaitu karena perusahaan sektor energi merupakan penghasil emisi karbon terbesar di Indonesia. Lalu, alasan pemilihan periode tahun 2020-2022 yaitu karena adanya kebijakan pengungkapan emisi karbon yang belum tetap dan terus berkembang serta semakin digalakkannya gerakan-gerakan untuk mengurangi emisi karbon dalam beberapa tahun terakhir ini, maka peneliti memilih periode tahun yang terbaru dalam penelitian ini. Dan peneliti menentukan judul penelitian ini sebagai berikut: **“PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN EMISI KARBON PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2022”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi (*transparency*) berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
2. Apakah akuntabilitas (*accountability*) berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
3. Apakah pertanggungjawaban (*responsibility*) berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
4. Apakah kemandirian (*independency*) berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
5. Apakah kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan guna memperoleh bukti empiris pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan emisi karbon perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori

Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta menjadi bukti empiris mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan emisi karbon.

2. Manfaat Praktik

Penelitian diharapkan dapat memotivasi perusahaan-perusahaan penghasil emisi karbon terutama sektor energi yang terdaftar di BEI yang belum mengungkapkan emisi karbonnya untuk mengungkapkan emisi karbonnya.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II CORPORATE GOVERNANCE, PENGUNGKAPAN EMISI KARBON, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.

Bab ini terdiri dari teori-teori yang mendukung penelitian ini yaitu teori *stakeholder* dan teori legitimasi, emisi karbon, *corporate governance*, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang jenis penelitian, objek penelitian, sampel dan teknik pengambilan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan tentang analisa data dan hasil pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan dan saran bagi penelitian selanjutnya.